



**PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2021**

JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3843348,3810350,3457661 FAKSIMILE 3810361

PENGUMUMAN

NOMOR: 20/Pansel/Japati/11/2021

**TENTANG
SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN
PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2021**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Mahkamah Agung RI tahun 2021, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

A. Jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka adalah:

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	I.a	1 orang
2	Kepala Badan Pengawasan	I.a	1 orang
3	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	I.a	1 orang
4	Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan	II.a	1 orang
5	Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar	II.a	1 orang
6	Sekretaris Pengadilan Tinggi Pontianak	II.b	1 orang
7	Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus	II.b	1 orang
8	Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus	II.b	1 orang

B. Persyaratan Administrasi

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Dengan syarat kepangkatan dan jabatan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.a)
 - 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Utama Madya (IV/d);
 - 2) Minimal 2 (dua) tahun dalam jabatan pimpinan tinggi pratama/struktural Eselon II.a atau Fungsional Ahli Utama atau yang disetarakan (Diutamakan pernah menduduki jabatan Hakim Tinggi atau Ketua Pengadilan Kelas IA Khusus/Kelas IA);
 - 3) Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun.
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a)
 - 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Tingkat I (IV/b) (Diutamakan yang sudah menduduki jabatan Eselon II.b);
 - 2) Minimal 2 (dua) tahun dalam jabatan administrator/struktural Eselon III.a atau Fungsional Ahli Madya atau yang disetarakan (Diutamakan yang telah menduduki jabatan selama 4 (empat) tahun);
 - 3) Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun.
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b)
 - 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembina (IV/a);
 - 2) Minimal 2 (dua) tahun dalam jabatan administrator/struktural Eselon III.a atau Fungsional Ahli Madya atau yang disetarakan (Diutamakan yang telah menduduki jabatan selama 4 (empat) tahun);
 - 3) Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun.
4. Berusia maksimal:
 - a. 58 tahun per 1 Maret 2022 untuk pelamar formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I);
 - b. 56 tahun per 1 Maret 2022 untuk pelamar formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a dan Eselon II.b);
5. Kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 atau setara;
6. Seluruh unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;

7. Tanda terima LHKPN dari KPK tahun terakhir;
8. Tanda terima penyerahan SPT tahun terakhir;
9. Tidak pernah/tidak sedang dijatuhi hukuman pidana penjara, hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
10. Mendapat persetujuan Eselon I untuk pelamar dari Mahkamah Agung dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan/atau Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama untuk pelamar dari Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI;
11. Mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk pelamar dari Kementerian/Lembaga (K/L) di luar Mahkamah Agung;
12. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Mahkamah Agung RI;
13. Surat keterangan sehat dari dokter pada rumah sakit pemerintah;
14. Peserta hanya dapat melamar 1 jabatan.

C. Persyaratan Khusus

1. Memiliki Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural.
2. Peserta Seleksi harus memiliki kemampuan:
 - a) Mengimplementasikan kebijakan Mahkamah Agung RI;
 - b) Administrasi umum (*man, money, material*);
 - c) Memahami Teknologi Informasi.
3. Bagi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum:
 - a) Mampu mengimplementasikan kebijakan Mahkamah Agung RI;
 - b) Memiliki konsepsi perencanaan program dan kebijakan teknis dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana Peradilan di lingkungan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
 - c) Mampu melaksanakan program dan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum di lingkungan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
 - d) Mampu memiliki kemampuan dalam perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang pembinaan teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara Peradilan Umum;
 - e) Mampu melaksanakan evaluasi program dan kebijakan, manajemen dan kepemimpinan di lingkungan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
 - f) Memiliki pengalaman terkait bidang teknis yustisial;

- g) Memiliki pengetahuan dan kemampuan administrasi umum/manajemen SDM, keuangan dan Aset (man, money, material);
 - h) Memahami Teknologi Informasi.
4. Bagi Kepala Badan Pengawasan:
- a) Memiliki konsepsi perencanaan program dan kebijakan pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung;
 - b) Mampu mengorganisasi pelaksanaan program dan kebijakan pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung;
 - c) Memiliki kemampuan dibidang pengawasan, pemeriksaan dalam hal teknis dan SDM peradilan;
 - d) Mampu melaksanakan evaluasi program dan kebijakan pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung;
 - e) Memiliki kemampuan komunikasi dalam organisasi;
 - f) Memiliki pengetahuan dan pemahaman teknis yustisial.
5. Bagi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan:
- a) Mampu mengimplementasikan kebijakan Mahkamah Agung;
 - b) Memiliki pengalaman dibidang penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan;
 - c) Memiliki pengetahuan dan pemahaman teknis yustisial;
 - d) Memiliki pengetahuan dan kemampuan administrasi umum/manajemen SDM, keuangan dan Aset (man, money, material);
 - e) Memahami Teknologi Informasi.
6. Bagi Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan:
- a) Mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dibidang penatausahaan surat, pelaksanaan administrasi, penyelenggaraan, dan penyusunan anggaran operasional Pimpinan Mahkamah Agung RI;
 - b) Memiliki kemampuan administrasi umum/manajemen SDM, Keuangan dan Aset (*man, money, material*);
 - c) Memahami Teknologi Informasi.
7. Bagi Sekretaris Pengadilan, peserta harus memiliki kompetensi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum/manajemen SDM, Keuangan dan Aset (*Man, Money, Material*) sebagai unit pendukung Pengadilan dan diutamakan yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

II. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan mulai **tanggal 01 November s.d 19 November 2021**
2. Lamaran ditujukan kepada panitia seleksi dengan dilengkapi:
 - a. Surat Lamaran (format terlampir);
 - b. Daftar Riwayat Hidup (format terlampir);
 - c. SK Pangkat terakhir dan SK jabatan yang disyaratkan;
 - d. KTP yang masih berlaku;
 - e. Ijazah terakhir;
 - f. Penilaian Prestasi Kerja dua tahun terakhir;
 - g. Bukti tanda terima LHKPN tahun terakhir;
 - h. Bukti laporan SPT Pajak tahun terakhir;
 - i. Sertifikasi keahlian yang dimiliki (jika ada);
 - j. Surat Keterangan Sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - k. Surat pernyataan *Professional Exposure* (format terlampir);
 - l. Surat persetujuan Eselon I untuk pelamar dari Mahkamah Agung dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan/atau Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama untuk pelamar dari Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI (format terlampir)/PPK untuk pelamar di luar Mahkamah Agung;
 - m. Surat pernyataan tidak pernah/tidak sedang dalam proses dijatuhi hukuman pidana penjara, hukuman disiplin tingkat sedang/berat yang dibubuhi materai Rp.10.000,- dan diketahui oleh atasan langsung disertai stempel dinas (format terlampir);
3. Pelamar melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan melalui website <https://pejabatonline.mahkamahagung.go.id>

Tahapan Seleksi/Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

No	Kegiatan	Tanggal*)	Keterangan
1.	Pengumuman	01 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang dilaksanakan secara <i>online</i>. • Pengumuman dilakukan melalui <i>website</i> resmi Mahkamah Agung RI
2.	Pendaftaran secara Online	01 s.d. 19 November 2021	
3.	Seleksi Administrasi	02 s.d. 22 November 2021	
4.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	23 November 2021	
5.	Seleksi Kompetensi Dasar		
	a) <i>Assessment Center</i>	29 November s.d. 4 Desember 2021	
	b) Penelusuran Rekam Jejak	22 November s.d. 4 Desember 2021	
6.	Pengumuman kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar	21 Desember 2021	
7.	Seleksi Kompetensi Bidang		
	a) Penulisan Makalah dan Presentasi Makalah	04 s.d 06 Januari 2022	
	b) Wawancara	10 s.d 14 Januari 2022	
8.	Pengumuman Hasil Seleksi	19 Januari 2022	

Catatan:

*) Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan melalui *website* Mahkamah Agung.

III. Ketentuan lain

1. Dokumen elektronik/berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan;
2. Pendaftaran dilakukan melalui *website* resmi Mahkamah Agung RI dengan alamat **<http://pejabatonline.mahkamahagung.go.id>**;
3. Mahkamah Agung dan Panitia Seleksi tidak mengadakan bimbingan tes atau persiapan pendahuluan dalam rangka Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;
4. Dalam seleksi ini **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN**;
5. Setiap perkembangan informasi seleksi ini disampaikan melalui *website* resmi **<https://www.mahkamahagung.go.id>**;
6. Segala biaya yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi tidak ditanggung oleh panitia;
7. Keputusan panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi pada Mahkamah Agung RI bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
8. Selama proses seleksi sampai dengan pengangkatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi, apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI



DR. H. HASBI, M.H.

FORMAT SURAT LAMARAN

Kota Domisili, tanggal, bulan, tahun

Yth. Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Pada Mahkamah Agung RI Tahun 2021
di -
Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Mengajukan lamaran sebagai dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Mahkamah Agung RI Tahun 2021.

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam tata cara pendaftaran yaitu:

1. Pas Foto berwarna dengan latar belakang berwarna merah;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Surat Keputusan Pangkat terakhir dan SK Jabatan yang disyaratkan;
4. KTP yang masih berlaku;
5. Ijazah terakhir;
6. Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
7. Bukti tanda terima LHKPN tahun terakhir;
8. Tanda terima SPT Pajak tahun terakhir;
9. Surat Keterangan Sehat dari Dokter rumah sakit pemerintah;
10. Sertifikat keahlian yang disyaratkan atau dimiliki;
11. Surat persetujuan Eselon I/Pimpinan Pengadilan untuk pelamar dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
12. Surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk pelamar dari Kementerian/Lembaga (K/L) di luar Mahkamah Agung;
13. Surat pernyataan tidak pernah/tidak sedang dijatuhi hukuman pidana penjara, hukuman disiplin tingkat berat/ sedang.

Demikian surat lamaran ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Materai
10000

.....

Lampiran II Pengumuman
Nomor : 20/Pansel/Japati/11/2021
Tanggal : 1 November 2021

**SURAT KETERANGAN
PERSETUJUAN ESELON I/PIMPINAN PENGADILAN/PPK**

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Disetujui untuk mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi pada Mahkamah Agung RI Tahun 2021.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut

Kota Domisili, 2021

Es. I/Pimpinan Pengadilan/PPK

Stempel dinas

Nama
NIP

Tembusan: (d disesuaikan)

Lampiran III Pengumuman
Nomor : 20/Pansel/Japati/11/2021
Tanggal : 1 November 2021

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH/TIDAK SEDANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA PENJARA,
HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT/SEDANG**

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

tidak pernah/tidak sedang dijatuhi pidana penjara, hukuman disiplin tingkat berat/sedang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut

Kota Domisili, 2021

Es. I/Pimpinan Pengadilan/PPK

Stempel dinas

Nama
NIP